

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengejawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

195

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
 8. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

/s/ Hj

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. dinas kebakaran dan penyelamatan;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. badan penanggulangan bencana daerah;
 - h. dinas sosial;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas lingkungan hidup;
 - k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

19 15

- l. dinas perhubungan;
 - m. dinas komunikasi dan informatika;
 - n. dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - o. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 - p. dinas pemuda dan olahraga;
 - q. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - r. dinas pariwisata;
 - s. dinas pertanian dan pangan;
 - t. dinas perdagangan dan perindustrian;
 - u. sekretariat daerah;
 - v. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - w. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - x. badan keuangan;
 - y. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - z. inspektorat daerah;
 - aa. kecamatan mandiangan koto selayan;
 - bb. kecamatan guguk panjang;
 - cc. kecamatan aur birugo tigo baleh; dan
 - dd. badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 5

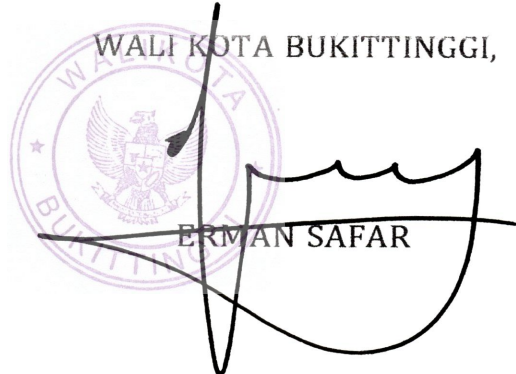
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

17/11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 25



***Renja Akhir
2024***

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



Alamat :

Kantor Balaikota Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakti Bukit
Gulai Banchah
Telp. (0752) 33369
Fax. (0752)
<http://bukittinggikota.go.id>

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2024. Keberadaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat dalam rangka Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijakan yang telah dirumuskan didasarkan kepada tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021-2026.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2024 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja yang maksimal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 2023

PLT.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTIINGGI



SURYADI, ST.MM

NIP. 19800922 201001 1010

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN.....	3
	1.1. LATAR BELAKANG	3
	1.2. LANDASAN HUKUM	4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... ..	9
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	9
	2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	22
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	25
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	33
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	35
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	36
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
	4.1 RENCANA KERJA	52
	4.2 PENDANAAN	57
BAB V	PENUTUP.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi tuntutan kebutuhan, baik dunia bisnis, pemerintahan, masyarakat dan individu yang akhirnya akan mewujudkan masyarakat informasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi juga merambah aspek tata kelola pemerintah. Pemanfaatan TIK diharapkan akan terciptanya transparansi, akuntabilitas, keadilan serta kemudahan dalam pelayanan pemerintah kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi juga menekankan pentingnya peranan TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik yang juga mendukung misi ke lima Kepala Daerah Kota Bukittinggi yaitu Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan dan tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, harus dilaksanakan secara efisien dengan melibatkan jejaring komunikasi, koordinasi antar perangkat daerah dan lintas instansi termasuk elemen masyarakat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tergambarnya adanya keseriusan pemerintah dalam menerapkan dan meningkatkan peranan TIK dalam pemerintahan (E-Government), baik dalam layanan internal pemerintahan maupun layanan public.

Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kominfo serumpun dengan Urusan Persandian dan Urusan Statistik. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, konsekwensinya adalah adanya perubahan tugas dan fungsi Kominfo yang juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 36 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktivitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi di tahun 2024, yang mengacu kepada Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026, yang akan diaktualisasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Rencana kerja tersebut juga mendukung Visi dan misi Kota, yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026.

Berbagai program dan kegiatan yang dijabarkan dalam renja tahun 2024 diharapkan dapat mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renja-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.
5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri KomuNikasi dan Informatika No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo.
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Urusan Persandian.
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026;

- 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 202 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
- 19. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah memantapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD yang mengemban fungsi penyelenggaraan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik Sektoral yang lebih profesional, akuntabel dalam rangka mewujudkan good dan clean government.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi diokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai proses membandingkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan penjelasan proses usulan program/kegiatan diperoleh dari pemangku kepentingan, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan pada tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Pada bab ini disertakan dengan tabel C-33 yang menggambarkan rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan prakiraan maju di tahun 2025.

BAB IV. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka Penilaian kinerja program dan kegiatan, pencapaian tujuan, hasil yang terjadi pada target program dan kegiatan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan untuk memperoleh umpan balik hasil rencana yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan rencana atau kebijakan untuk tahun yang akan datang. Evaluasi juga merupakan sebuah penilaian terhadap jalannya rencana yang dilakukan secara periodik atau berkala selama proses pelaksanaan program dan kegiatan dimana rencana telah dioperasionalkan pada kurun waktu tertentu

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan data dan statistik, melaksanakan 5 Program dengan 10 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Untuk pagu dana belanja/pengeluaran awal sebesar Rp.9.904.398.895 dan setelah dilakukan perubahan anggaran menjadi Rp.10.091.964.537 dengan realisasi sebesar Rp.9.332.871.184. Sementara itu disisi pendapatan ditargetkan sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.263.640.000,-. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 tujuan, 3 sasaran, 7 strategi dan 15 kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021- 2026.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang ada pada setiap Perangkat Daerah atau merupakan program rutin yang mendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tujuan dan sasaran adalah tersedianya layanan administrasi perkantoran.

Pada tahun 2022, program ini dana sebesar Rp 3.348.968.141,- dengan realisasi sebesar Rp3.248.166.794,- (97%), target kinerja program 100% dengan capaian kinerja 100%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan.

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan pagu dana sebesar Rp.18.429.950,- dengan realisasi sebesar Rp.18.131.400,- (98%). Target kinerja output 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini mempunyai SubKegiatan yaitu :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu dana Rp.18.429.950,- dengan realisasi sebesar Rp.18.131.400,- (98%). Target kinerja output 100% terealisasi 100%
2. **Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.907.267.191,- dengan realisasi Rp.2.823.690.261,- (97%) dengan capaian 100%. Kegiatan ini mempunyai Subkegiatan yaitu :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.907.267.191,- dengan realisasi Rp.2.823.690.261,- (97%) dengan capaian 100%.
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.471.000,- dengan realisasi sebesar Rp.184.778.083 (99%) dengan realisasi fisik/kinerja 100%. Kegiatan mempunyai 5 SubKegiatan yaitu :
 - 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu dana Rp. 701.000,-. Realisasi subkegiatan ini sebesar Rp.676..000,- (96%) dengan capaian fisik/kinerja 100%.
 - 3.2. Penyediaan Peeralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp.21.550.000,- terrealisasi sebesar Rp.20.397.000,- (95%), dan realisasi capaian kinerja 100%.
 - 3.3. Penyediaan Bahan Logistik, dengan pagu anggaran Rp.6.351.000,- dengan realisasi RP.6.095.050,- (96%). Realisasi fisik/kinerja 100%.
 - 3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pagu anggaran utnuk subkegiatan ini sebesar Rp.5.709.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.705.500,- (100%) dan realisasi fisik/ kinerja 100%.
 - 3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.152.160.000,- dengan realisasi anggaran Rp.151.904.533,-(100%), dan capaian kinerja/fisik 100%.

4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** , dengan pagu dana kegiatan sebesar Rp.50.250.000,- teralisasi sebesar Rp.49.967.800,- (99%). Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) Subkegiatan yaitu :
 - 4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.250.000,- teralisasi sebesar Rp.49.967.800,- (99%) dengan capaian kinerja 100%.
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan disediakan pagu anggaran sebesar Rp.19.363.000,- terealisasi sebesar Rp.18.510.517,-(96%) dengan capaian kinerja/fisik 100%. Kegiatan ini mempunyai 2 Subkegiatan yaitu :
 - 4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran Rp.1.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1200.000,- (100%), dan capaian kinerja/fisik 100%.
 - 4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp.18.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.618.200,- (76%). dan capaian kinerja/fisik 100%.
5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.** Pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 167.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.156.781.050,- (93%) dan realisasi capaian kinerja/fisik 100%. Kegiatan ini memiliki 4 SubKegiatan yaitu :
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp.39.190.000,- dengan realisasi Rp.38.620.750,- (98,5%) dengan capaian kinerja 100%.
 - 5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.400.000,- dengan realisasi Rp.66.038.100,- (87,5%) dengan capaian kinerja 95%.
 - 5.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagua anggaran yang tersdia untuk melaksanakan subkegiatan ini adalah Rp.7.510.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.037.000,- (93,7) dan capaian kinerja/fisik sebsar 90%.
 - 5.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kanotr dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp.45.250.000,- dengan realisasi angaran Rp.45.085.200,- (99,6%) dengan capaian kinerja/fisik 100%.

II. Program Informasi Komunikasi Publik,

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.750.851.130,- dengan realisasi sebesar Rp.2.228.834.505,- (81%) dan capaian kinerja/fisik program ini adalah 93%. Program ini memiliki 1 Kegiatan dan 6 Subkegiatan.

Kegiatan tersebut yaitu :

1. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.750.851.130,- dengan realisasi sebesar Rp.2.228.834.505,- (81%) dan capaian kinerja/fisik 93%. Kegiatan tersebut memiliki 6 Subkegiatan yaitu :

- 1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Pagu yang disediakan untuk Subkegiatan tersebut sebesar Rp.39.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp.32.625.315.

Subkegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Layanan pengaduan public dengan memanfaatkan aplikasi Lapor Span. Indikator kinerja Subkegiatan ini adalah Laporan Tindak lanjut pengaduan public dilingkungan Pemda Bukittinggi dengan capaian kinerja 95%.

- 1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Komunikasi Publik. Pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan sebesar Rp1.508.331.340,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.197.702.875,-(79%).

Subkegiatan ini mengakomodasi kegiatan mempublikasikan informasi Pemko berupa Kerjasama dengan media massa/ cetak, media online dan radio. Indikator dari subkegiatan adalah Kerjasama media tersebut baik media cetak maupun digital dengan capaian 90%.

- 1.3. Pengelolaan media Komunikasi Publik. Pagu Dana yang disediakan untuk Subkegiatan ini sebesar Rp.269.655.770. dengan realisasi Rp.237.509.168,- (88%).

Pada subkegiatan ini berisikan belanja untuk mendukung pelaksanaan peliputan dan publikasi informasi melalui situs resmi Pemko Bukittinggi, serta belanja sarana dan prasarana peralatan studio untuk pendukung publikasi Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Website Kota Bukittinggi terkelola dengan target kinerja 12 bulan. Sedangkan realisasi kinerja dan fisik adalah 100%.

Hasil yang diharapkan adalah informasi Kota Bukittinggi dapat dipublikasikan melalui Website Bukittinggikota.go.id. Untuk tahun

2022 informasi pemerintah daerah yang telah dipublikasi melalui situs resmi Pemko Bukittinggi.

- 1.4. Pelayanan Inforamsi Publik, Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp.22.357.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.616.250,- (65%).

Indikator output dari kegiatan adalah Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) Kota Bukittinggi yang dapat di informasikan dan diberikan kepada publik baik secara langsung oleh PLID maupun dipublikasikan melalui website PPID, dengan capaian kinerja sebesar 90%. Pada tahun 2022 pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik Kota Bukittinggi masuk dalam kategori “Informatif “. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan belanja perjalanan dinas yang telah direncanakan pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu.

- 1.5. Layanan Hubungan Media, dimana pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.434.986.000,- dengan realisasi sebesar Rp.344.327.050,- (79%) dan capaian kinerja sebesar 90%. Indikator jumlah berita yang dipublikasikan.
- 1.6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dimana pagu anggaran Rp.73.473.000 dengan realisasi sebesar Rp.69.907.650,- (95%) dengan capaian 100%. Indiaktor dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan jurnalistik bagi kaum muda di kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan capaian 100%.

II. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dilaksanakan guna terwujudnya pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik disisi sarana dan prasarana serta aplikasi yang menunjang pelaksanaan dan pelayanan intra Pemko Bukittinggi maupun untuk pelayanan publik. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp3.858.871.666,- dengan realisasi sebesar Rp.3.738893.335- (97%). Capaian kinerja program ini 98%. Pelaksanaan program **Pengembangan Aplikasi Informatika** ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemeritnah Daerah Kabupaten/Kota.**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.691.351.608,- dengan realisasi sebesar Rp.2.649.173.210,-(98%) dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Subkegiatan yaitu :

1.1.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah.

Pagu dana yang disediakan untuk Subkegiatan ini sebesar Rp.2.691.351.608,- dengan realisasi sebesar Rp.2.649.173.210,-(98%) Indikator kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya Jaringan Internet dan Intranet sebanyak 115 titik yang tersebar pada SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi, Puskesmas, sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah dasar.Target output untuk kegiatan ini pemeliharaan untuk 115 titik dan langganan akses internet selama 12 bulan dengan realisasi kinerja untuk kegiatan ini adalah 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.1.167.520.058,- dengan realisasi Rp.1.089.720.125,- (94%), dengan capaian kinerja 96%. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Subkegiatan sebagai berikut:

2.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-governement dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.183.827.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.161.861.250.- (88%).

Indikator Subkegiatan ini adalah Penyusunan dokumen *Smart City* yang bekerjasama dengan Kementrian Kominfo. Dengan melaksanakan 3 kali sosialisasi dan bimbingan maka telah dihasilkan dokumen *Smart City* Kota Bukittinggi. Subkegiatan ini juga salah satu kegiatan dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana tahun ini Bukittinggi memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 2,46 dari target yang ditetapkan sebesar 2,5.

2.2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dimana pagu yang tersedia untuk Subkegiatan ini sebesar Rp.291.205.304,- dan realisasi sebesar Rp.271.971.302,-. (93%). Indikator kinerja untuk Subkegiatan ini adalah Sarana dan prasarana Bukittinggi *Command Center* terkelola selama 12 bulan, dan pengadaan CCTV untuk area publik dengan capaian kinerja 100%.

2.3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik.

Alokasi Anggaran untuk Subkegiatan ini sebesar Rp.666.647.754,- dengan realisasi Rp.638.998.173,- (96%).

Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tersedianya sistem informasi aplikasi dengan target tersedianya 4 aplikasi dengan realisasi 4 aplikasi. Realisasi kinerja output untuk kegiatan ini 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Mengakomodasi kebutuhan Aplikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung terlaksananya e-government.

2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Pagu Anggaran yang tersedia untuk Subkegiatan ini sebesar Rp.25.840.000,- dengan realisasi Rp.16.894.400,- (65%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan belanja hak spektrum frekwensi radio tahun ini tidak dipungut oleh Badan Monitoring Wilayah Sumatera Barat.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Data menara telekomunikasi, dimana sebagai dasar untuk menerbitkan SKRD. Dengan terbitnya SKRD maka pendapatan atas retribusi pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi dapat dipungut. Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 90%.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan melakukan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bukittinggi. Alokasi dana untuk program ini sebesar Rp.53.080.600,- dengan realisasi sebesar Rp.51580.850,- (97%). Dengan capaian kinerja 100%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.53.080.600,- dengan realisasi sebesar Rp.51580.850,- (97%). Dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini memiliki 1 Subkegiatan yaitu :

- 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral, dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.080.600,- dengan realisasi sebesar Rp.51580.850,- (97%).). Indikator output dari Subkegiatan ini adalah Data Statistik sectoral dan Buku Bukittinggi Dalam Angka (BDA). Capaian kinerja adalah 100%.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Program ini bertujuan untuk melakukan pengaman informasi Pemerintah Kota Bukittinggi melalui peralatan sandi dan pelaksanaan Tanda Elektronik. Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.80.193.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.395.700,- (82%) dengan capaian program 95%. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi emePrintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dialokasikan Anggaran Rp.80.193.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.395.700,- (82%).) dengan capaian kegiatan 95%. Kegiatan ini memiliki 2 Subkegiatan yaitu :

1.1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran untuk Subkegiatan ini sebesar Rp. 50.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.805.250,- (83%). Indikator output untuk Subkegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan target 3 orang.

1.2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Elektronik.

Alokasi Dana untuk Subkegiatan tersebut sebesar Rp.29.553.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.590.450,-

Indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi adalah Pengelolaan Persandian Pemko Bukittinggi dengan target kinerja 400 informasi. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 368 infromasi (92%).

Untuk realisasi anggaran dan kinerja secara lebih rinci pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sampai triwulan II tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kota Bukittinggi

Dinas : Komunikasi dan Informatika

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4*100
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	A	BB	BB	A	100%	BB	0	0
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum danj kepegawaian	95%	90%	90%	90%	100%	90%	25%	26%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renstra	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dok	100%	3 Dokumen	2 dok	75%%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	90%	80%	80%	80%	100%	85%	80%	88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan	25 orang	22 bulan	22 orang	22 orang	100%	22 orang	22 orang	88%
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum danj kepegawaian	95%	90%	90%	90%	100%	90%	25%	26%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis	7 jenis	7 Jenis	7 jenis%	100%	7 Jenis	0 jenis	0 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor disediakan	30 Item	31 item	30 item	30 item	15 %	30 item	15 item	50 %
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak, Penggandaan	8 jenis, 6672 lbr	8 jenis 16492 lbr	7 jenis, 7000 lbr	7, jenis, 7000 lbr	100%	7 jenis, 7000 lbr	4 jenis/1000	50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultansi	20 dok	12 bulan	20 dok/12 bln	20 dok / 612bulan	100%	20 Dokumen/12 bln	10 dok/6 bln	50%

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4*100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan unum danj kepegegawaian	95%	90%	90%	90%	100%	90%	25%	26%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10.000, buku cek	109 buah	109 materai	109 buah	109	100%	109 buah	109	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, token listrik	2 rekening	12 bulan/2 rekening	12 bulan/2 rekening	12 bulan/ 2 rekening	100%	12 bulan/ 2 rekening	3 bulan/ 2 rekening	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningaktnya pengelolaan BMD	95%	85%	85%	85%	100%	90%	25%	26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	1 unit kendaraan roda 4	4 unit roda 4 dan 1 unit roda 2	1 unit kend roda 4 dan 1 unit roda 2	1 unit kend roda 4 dan 1 unit roda 2	100%	1 unit kend roda 4	1 unit kend roda 4	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	0	0	4 unit kend roda 4, 1 unit kendaraan roda 2	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	75%	3 unit kend roda 4, 1 unit kendaraan roda 2	3 unit kend roda 4, 1 unit kendaraan roda 2	25%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	15 unit	12 bulan	12 unit	10 unit	83%	12 unit	3 unit	23%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12bulan	100%	12 bulan	3 bln	25%
	PROGRAM INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	18%	0%	18%	18%	100%	18%	6%%	33%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Konten Informasi publik yang dipublikasikan	75%	60%	75%	75%	100%	75%	25%	33%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	laporan tindak lanjut pengaduan public	1 Dok/Laporan	1	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kerjasama media online, kerjasama radio, langganan Media cetak	30 media	7 media/ 12 bln	7 media/12 bln	7 media / 12 bulan	100%	38 media/10	38 media / 3 bulan	25 %
	Pengelolaan Media	Jumlah informasi yang	450 informasi	540 informasi/ 12	450 informasi	500 informasi	111%	450 informasi	100 informasi	22%

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4*100
	Komunikasi Publik	dipublikasikan		bln						
	Pelayanan Informasi Publik	Laporan layanan informasi dan dokumen public	1 Laporan/DIP	1 Dok/ 2 kali movev	1 dokumen	1 dokumen	10%	1 dokumen	1 dokumen	25%
	Layanan Hubungan Media	Publikasi berita melalui media non elektronik	100 rekom	100 rekom	100 rekom	50 rekom	50%	100 rekom	150 rekom	12 bulan
	Kemitraan dengan Pemamngku Kepentingan	Jumlah pemilihan metra terbaik, KIM dan lomba konten kreatif	3 KIM/1 Metra/ 3 konten terbaik	0	2 kali	0	0%	2 kali	0	0%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi	44%	100%	44%	44%	100%	44%	27%%	30%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SKPD dan area publik yang tersambung dengan Fiber Optick	85%	100%	85%	85%	100%	85%	25%	25%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik layanan akses internet	120 titik/12 bulan	110 titik/ 12 bulan	115 titik	115 titik/6bulan	100%	115 titik	115 titik/3 bulan	25%
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang berbagi pakai/dikembangkan/dikelola	44%	100%	90%	90%	100%	90%	30%	33%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan SPBE	1 dok	1 Dok/ 2 kali movev	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dok	0%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Pusat Data yang dikelola	3 unit	2 unit / 12 bulan	2 unit/12 bln	2 unit/12 bulan	100%	2 unit/12 bulan	2 unit/ 3 Bulan	25%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pemda	3 Aplikasi	4 aplikasii	3 buah	3 buah	100%	3 buah	1 buah	33%

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4*100
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Laporan Menara Telekomunikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	0 dokumen	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pesersentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	45%	35%	35%	30%	85%	40%	10%	25%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SKPD SKPD yang menghasilkan data sektoral dalam portal SDI	45%	35%	35%	30%	85%	40%	10%	25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Buku Bukuttinggi dalam Angka, Data Sektoral Kota Bukittinggi	1 buku, 1 dokumen	1 buku, 1 dokumen	1 buku, 1 dokumen	1 buku, 1 dokumen	100%	1 buku, 1 dokumen	0 buku, 0 dokumen	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Aplikasi yang lulus uji BSSN	33,3	11	11,1	6,2	55%	22,2	0	0%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur dan aplikasi TIK yang diamankan	3,4	3,0	3,2	2,8	8,7	3,3	1,0%	30%
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pegawai mengikuti pelatihan	3 orang	0	3 orang	0	0%	3 orang	1 orang	33%
	Penyediaan Layanan Keamanan	Jumlah infrastruktur Tik Diamankan	3 item, 3 dok	0	0	0	0%	3 item, 3 dokumen	1 dokumen	25% %

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi pelakasnnaan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika fungsi pengembangan, pemanfaatan Teknologi Informasi baik untuk kebutuhan Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat dan pelaksanaan penyebaran informasi publik untuk mendukung kualitas dan kuantitas pelayanan kepada publik. Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dan menetapkan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan secara profesional dan komprehensif, sehingga pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dapat terealisasi dengan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dan diukur dengan evaluasi kinerja terhadap 6 (enam) sasaran yaitu :

1. Peningkatan kapasitas, kualitas dan profesionalisme ASN Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Peningkatan keamanan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah.
4. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik.
5. Ketersediaan aplikasi, database dan data statistik sektoral data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
6. Peningkatan implementasi e_government dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik.

Adapun indikator Kinerja pelayanan Perangkat Daerah untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Cakupan/jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk.
2. Jumlah diseminasi informasi yang dilaksanakan
3. Persentase layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
4. Jumlah Perangkat sandi yang tersedia
5. Jumlah kebijakan dan regulasi TIK yang tersedia.
6. Akses intranet dan internet yang terpenuhi.
7. Jumlah area publik, SKPD dan unit kerja terkoneksi intranet dan internet.

- 8. Jumlah sarana dan prasarana pendukung Bukittinggi Command Center yang tersedia
- 9. Jumlah sistem informasi / aplikasi e-government.
- 10. Persentase penggunaan database dan data statistik sektoral.
- 11. Persentase penerapan e-government di Perangkat Daerah.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Proyeksi		Realisasi Capaian			proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3	2,5	2,8	3	3,5	2,3	2,5	2,8	3	3,5
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			90	92	93	94	96	91	92	93	94	96
3	Persentase pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral			20%	25%	3,75%	50%	62,50%	25%	27,50%	40%	60%	65%
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			I	I	II	II	II	I	I	II	II	II

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, urusan dan kewenangan yang harus dilaksanakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.

Dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, beberapa kegiatan penerapan e-goverment sampai saat telah dilakukan. Penerapan e-government melalui pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah dikembangkan baik dari segi infrastruktur, aplikasi dan SDM. Dalam hal ini infrastruktur jaringan intranet, akses internet, aplikasi, pelayanan informasi publik, sarana pengaduan publik dan SDM yang memahami Teknologi, Informasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan e-government dapat ditingkatkan. Sementara itu, kebutuhan SDM pengelola TIK pada Dinas Kominfo masih belum memadai, sehingga pelayanan sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi bagi pemerintah dan kepada publik masih belum bisa terpenuhi dengan

baik. Disamping itu SDM Pemko Bukittinggi juga harus memahami penggunaan sarana TIK agar pelayanan kepada publik dapat berjalan lebih maksimal.

Seiring dengan bertambah jumlah user di Perangkat Daerah yang menggunakan akses intranet dan internet serta penggunaan aplikasi yang berbasis web, mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan bandwidth untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik. Selain itu dibutuhkan juga pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana TIK, Wifi di area publik, dan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan diseminasi informasi, baik menggunakan media tradisional, Kelompok Informasi Masyarakat, sosialisasi serta memaksimalkan pemanfaatan media layanan informasi berbasis teknologi informasi.

2.3.1 Isu- Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas kedinasan isu-isu strategis baik dari dalam maupun luar Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Keterbatasan SDM pengelola TIK.
2. Kompetensi tenaga di bidang Komunikasi dan informatika khususnya untuk programmer dan teknisi jaringan.
3. Kebutuhan akses internet yang semakin meningkat
4. Peningkatan kapasitas jaringan internet dan intranet.
5. Peningkatan pembinaan dan mendayagunakan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Peningkatan kompetensi SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan urusan, tugas dan fungsi SKPD

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan urusan, tugas pokok dan fungsi adalah :

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum seluruhnya kelurahan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

2. Pengelolaan isu public dan aduan masyarakat belum optimal.
3. Belum optimal Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Layanan Publik.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Terbatasnya SDM pengelola statistik (belum ada fungsional statistik dan geodesi).
2. Pengelolaan Satu Data Indonesia belum optimal.
3. Belum adanya regulasi / kebijakan pengelolaan SDI tingkat daerah.

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Belum adanya kebijakan tentang Keamanan Informasi.
2. Layanan Keamanan informasi dan sertifikat elektronik belum terlaksana secara optimal.
3. Terbatasnya sumber daya pengelolaan keamanan informasi dan persandian.

2.3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal

2.3.3.1 Peluang

1. Adanya dukungan pimpinan terhadap Dinas Kominfo.
2. Tersedia media informasi untuk didayagunakan.
3. Kebutuhan pengembangan layanan e_government.
4. Kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Bukittinggi *Smart City*.
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
6. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Tersedianya Dukungan dana dari sumber APBD.

2.3.3.2 Tantangan

1. Masih kurang jumlah SDM pada Dinas komunikasi dan Informatika serta terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya.
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Globaisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
4. Sarana dan prasarana pendukung TIK yang belum memadai.
5. Tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Disamping program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap Perangkat Daerah, program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3. Program Aplikasi Informatika
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor..
- 5. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021- 2026. Diharapkan Capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan maksimal, sehingga masih dibutuhkan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sama pada tahun 2024. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 lampiran rencana kerja 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Dinas : Komunikasi dan Informatika

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.742.739.996					10.684.132.866	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				4.140.129.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				3.589.096.416	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pernagkat Daerah				36.739.900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pernagkat Daerah				27.527.400	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja	Dinas Kominfo	2 dokumen	36.739.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja	Dinas Kominfo	2 dokumen	27.527.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.111.037.616	
2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Belanja Gaji dan Tunjangan	Dinas Kominfo	12 bulan	3.300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Belanja Gaji dan Tunjangan	Dinas Kominfo	12 bulan	3.111.037.616	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Dinas Kominfo	4 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Dinas Kominfo	4 Laporan	0	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	
3.3	Pengadaan Pakiana Dinas beserta Tribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Dinas Kominfo	0	30.000.000	Pengadaan Pakiana Dinas beserta Tribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Dinas Kominfo	25 paket	0	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.771.400	
3.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kominfo	1 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen insstalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kominfo	1 paket	655.500,-	
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Kominfo	31 Item	6.855.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahn logistik kantor yang disediakan	Dinas Kominfo	31 Item	6.855.000,-	
3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Kominfo	8 Jenis, 6672 lbr	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Kominfo	8 Jenis, 6672 lbr	4.610.900,-	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	25 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan komsultasi SKPD	Dinas Kominfo	25 Laporan	113.650.000,-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.200.000,-	
4.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kominfo	200 buah	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Diskominfo	200 laporan	1.200.000,-	
4.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Kominfo	2 laporan	18.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Diskominfo	2 laporan	18.000.000,-	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				354.190.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana TIK	Bukittinggi	80 %	305.560.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipeliharandan dibayarkan pajaknya	Dinas Kominfo	1 unit	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipeliharandan dibayarkan pajaknya	Bukittinggi	1 unit	39.190.000	
5.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Kominfo	6 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bukittinggi	6 unit	113.500.000,-	
5.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Dinas Kominfo	20 Unit	120.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Bukittinggi	20 Unit	107.870.000,-	
5.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo	4 Unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukittinggi	4 Unit	45.000.000,-	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Diskominfo	12 bulan	40,470,000	
6.13	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang tersedia	Dinas Kominfo	15 unit	0	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang tersedia	Diskominfo	12 bulan	0	
II	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.902.579.516	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan / 1 dok	4.596.368.500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				2.149.999.808	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Dokumen Perencanaan TIK JangkaMenengah Tersedia	Bukittinggi	1 Dokumen	3.125.928.500	
7.16	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bukittinggi	120 Unit	2.149.999.808	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bukittinggi	120 Unit	3.125.928.500	
8	<i>Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				752.579.708	<i>Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1.470.440.000	
8.17	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Bukittinggi	1 Dokumen	146.665.100	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Bukittinggi	1 Dokumen	284.373.800	
8.18	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Bukittinggi	2 Unit	79.914.904	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Bukittinggi	2 Unit	660.017.500	
8.19	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi yang dihasilkan	Bukittinggi	3 Unit	445.999.704	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Bukittinggi	3 Unit	376.048.900	
			Bukittinggi	1 aplikasi			Jumlah aplikasi yang dihasilkan	Bukittinggi	1 aplikasi		

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
8.20	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bukittinggi	1 Dokumen	80.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bukittinggi	1 Dokumen	149.999.800	
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.135.007.480	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.340.874.150	
9	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>2.135.007.480</i>	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>2.340.874.150</i>	
9.21	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring opini dan Aspirasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	567.280.820	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring opini dan Aspirasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	275.480.100	
9.22	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	194.557.420	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	417.326.850	
9.23	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	39.904.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Bukittinggi	1 Dokumen	43.402.700	
9.24	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Bukittinggi	2 Dokumen	918.662.140	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Bukittinggi	2 Dokumen	777.856.300	
9.25	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Bukittinggi	2 Layanan	197.101.100	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Bukittinggi	2 Layanan	371.311.400	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
9.26	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Bukittinggi	1 Dokumen	217.502.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Bukittinggi	1 Dokumen	51.570.000	
9.27	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Bukittinggi	2 Dokumen	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang ikut Diklat/Bintek Komunikasi Publik	Bukittinggi	5 orang	403.927.000	
3	STATISTIK				1.432.824.200	STATISTIK				74.092.200	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.432.824.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				74.092.200	
10	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD</i>			1.432.824.200	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD</i>			74.092.200	
10.2 7	Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desimindasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bukittinggi	2 Dokumen	232.824.200	Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desimindasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bukittinggi	2 Dokumen	74.092.200	
10.2 8	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningaktan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Luar Daerah	4 Orang	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningaktan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Luar Daerah	4 orang	0	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catt
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
10.29	Pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Bukittinggi	1 Unit	1.2000.000.000	Pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Bukittinggi	1 Unit	0	
4	PERSANDIAN				132.198.900	PERSANDIAN				83.701.600	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				132.198.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				83.701.600	
11	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</i>			132.198.900	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</i>			83.701.600	
11.30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	1 Laporan	43.630.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	Dinas Kominfo	1 Laporan	23.630.000	
11.31	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	4 Perangkat Daerah	88.568.900	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	4 Perangkat Daerah	60.071.600	
TOTAL					17.955.437.295					17.955.437.295	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada penyusunan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 salah satunya melalui tahapan pelaksanaan Musrenbang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi juga ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan musrenbang tersebut sejak dari Musrenbang kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga perencanaan bottom up tersebut dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan musrenbang tahun 2023, tidak usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika untuk anggaran tahun 2024. Untuk tahun 2024 terdapat beberapa pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berikut adalah Dana Pokir pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 2.4 USULAN POKIR DPRD KOTA BUKITTINGGI PADA RKPD TAHUN 2024
SKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


No	NAMA	USULAN KEGIATAN	SKPD PELAKSANA	PERMASALAHAN (YANG MENJADI DASAR USULAN KEGIATAN)	SASARAN RPJMD YANG DIDUKUNG	LOKASI YANG DIUSULKAN			JUMLAH / VOLUME	USULAN ANGGARAN	KETERANGAN (FISIK/ NON FISIK/ HIBAH)	VERIFIKASI SKPD			KETERANGAN (KESESUAIAN TEKNIS/REGULASI)
						DETAIL LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IBNU ASIS,S.TP	Diklat jurnalistik remaja mesjid	Diskominfo					Bukittinggi		60,000,000	Non Fisik	Pengelolaan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali Bimtek 40 peserta	60,000,000	
2	ERDISON NIMLI, A.Md	Pembelian Peralatan Wartawan Parlemen	Diskominfo			Wartawan parlemen				50,000,000	Non Fisik	Layanan Hubungan Media		50,000,000	
3	ALIZARMAN,SHI,SH	Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Cabang Kota Bukittinggi	Diskominfo	Pelatihan SDM Wartawan dan pengadaan Sarana		Jl Sudirma Blok. LT2 No 64 RT 002/RW 02	birugo	ABTB		40,000,000	Non Fisik	Layanan Hubungan Media		50,000,000	
										150,000,000				160,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional bidang Komunikasi dan Informatika melalui digitalisasi nasional, sebagaimana yang dituang dalam kebijakan strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika. Berupaya dalam membangun fundamental digital nasional lebih tersturktur dan massif. Hal tersebut tercermin dalam 3 tujuan strategis Kemkominfo yaitu :

- 1. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang berkualitas diseluruh Indonesia.
- 2. Mendorong percepatan transformasi digital pada aspek bisnis, publik dan pemerintahan
- 3. Memper  nformasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrasturktur TIK merupakan landasan utama menuju digitalisasi nasional harus sampai kepelosok seluruh Indonesia, sehingga berbagai aplikasi dan konten positif dapat diakses dan dimanfaatkan seluruh Masyarakat Indonesia.

Penuntasan infrastruktur TIK diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia, talenta digital dan ekosistem digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, akan melaksanakan trasnformasi percepat Pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia dan memepcepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi public, maka dilakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi public yang efektif dan terorganisir serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsive konten hoaks.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyelaraskan sasaran strategis dan program nasional kedalam sasaran dan program di tingkat kota.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika turut berupaya mewujudkan pemerintahan secara baik (good governance) dan bersih (Clean Government), keterbukaan informasi publik termasuk penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain profesionalisme dari pelaku penyelenggara pemerintahan. Dengan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung Visi Kepala Daerah " **Menciptakan Bukittiinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah** " dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, akan melaksanakan Misi V yakni “ **HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN** “.

3.2.1. Tujuan

Tujuan dari rencana kerja yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam revisi rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittinggi tahun 2021 – 2026 adalah:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
					2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,8	3
			2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	93	94
		Termanfaatnya Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan aspek statistic sectoral	Persen	37,5	50
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Tingkat (level)	I	II

Strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

3.2.3.Strategi :

1. Meningkatnya kebijakan internal, Tata kelola dan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana TIK.
3. Pelayanan informasi berbasis teknologi informasi yang prima.
4. Menyelenggarakan Komunikasi publik resmi yang intens.
5. Menyediakan data statistic sektoral yang handal.
6. Meningkatkan pengamanan informasi pemerintah daerah
7. Meningkatnya kapasitas SDM bidang TIK ASN Kominfo

3.2.4.Kebijakan :

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Internal Pemerintah dalam penerapan e-Government
- 2. Penataan proses teknologi informasi pada tingkat kebijakan, tata kelola dan layanan
- 3. Melaksanakan keamanan perangkat teknologi
- 4. Melaksanakan keamanan dokumen Pemerintahan Daerah
- 5. Adopsi dan adaptasi terhadap teknologi terkini
- 6. Transformasi data konvensional ke data digital
- 7. Pengolahan data berbasis Teknologi Informasi
- 8. Penyajian informasi pada multi platform
- 9. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Informasi Publik

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan yang berisikan kegiatan rutin, insiatif Perangkat Daerah, Pokir, Prioritas Kepada Daearah dan dana Hibah. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

Tabel.3.2 Program Dan Kegiatan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan administrasi keuangan tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan ADM kepegawaian sesuai SOP
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Kepuasan Komunikasi dan Informasi Publik
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Konten Informasi yang disebarluaskan
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Layanan
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD dan Area Publik yang terhubung dengan jaringan Fiber Optic
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola Persentase regulasi terkait TIK yang ditetapkan
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase SKPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar</i>
			<i>Persentase SKPD yang menyampaikan rekomendasi kegiatan statistik sektoraal yang valid dan update</i>
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid dan update</i>
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Indeks Aplikasi sesuai KAMI</i> <i>Indeks Infrastruktur sesuai KAMI</i>
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase informasi yang diamankan dengan perangkat sandi</i> <i>Persentase SKPD yang bersertifikat elektronik</i>
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuangdalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mengemban tugas dalam misi ke-2 (dua), yaitu:

“ Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan ”

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada misi tersebut perlu upaya ekstra untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara maksimal. Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan perkembangan pembangunan yang menuntut semakin berkualitasnya Pelayanan Informasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi Informasi.

Melalui forum perangkat daerah tersebut dilakukan penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, antar perangkat daerah dan sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran masing-masing perangkat daerah.

Seiring dengan terbitnya Pemendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah serta Keuangan dan Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal ini akan mempengaruhi penyusunan Renja Perangkat Daerah terutama dalam penamaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk menyikapi hal tersebut dilakukan pemetaaan program dan kegiatan berdasarkan permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021.

Oleh sebab itu rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengakomodir pencapaian target kinerja urusan-urusan tersebut sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.

4.1.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan yang berisikan kegiatan rutin, insiatif Perangkat Daerah, Pokir, Prioritas Kepada Daearah dan dana Hibah. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut.

Tabel.4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Tabel Tc.3.3

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.684.132.866,00							10.094.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.684.132.866,00							10.094.500.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.526.339.066,00							9.854.500.000,00	
1.	2.16.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-			A nilai	3.589.096.416,00						-	4.454.500.000,00	
	2.16.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan administrasi keuangan tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-			100 persen 95 persen	27.527.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	-	40.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	27.527.400,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Kominfo		40.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												5.Pengembang an tata kelola pemerintahan				
	2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	-			100 persen	3.111.037.616,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	-	3.540.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bula n	3.111.037.616,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Kominfo		3.500.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD				4 Laporan	0	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		40.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan ADM kepegawaian sesuai SOP	-			90 persen	0			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang	Dinas Kominfo	-	40.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												an tata kelola pemerintahan				
	2.16.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		40.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi	-			90 persen	125.771.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	-	223.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	655.500,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		3.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.855.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		12.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.610.900,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		8.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	113.650.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		200.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			90 persen	0			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	-	150.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		150.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi	-			90 persen	19.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	-	21.500.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		1.500.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola	Dinas Kominfo		20.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan				
	2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			90 persen	305.560.000,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dins Kominfo	-	440.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dins Kominfo		40.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	113.500.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dins Kominfo		150.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	107.870.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dins Kominfo		150.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi				3 Unit	45.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	Dins Kominfo		100.000.000,00	Dinas Kominfo
2.	2.16.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Kepuasan Komunikasi dan Informasi Publik	-			87 persen	2.340.874.150,00						-	2.375.000.000,00	
	2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Konten Informasi yang disebarluaskan	-			65 persen 85 persen	2.340.874.150,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat	-	2.375.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.0 2.2.01. 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	275.480.100,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		500.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 2.2.01. 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	777.856.300,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		925.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 2.2.01. 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	417.326.650,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		500.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 2.2.01. 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	43.402.700,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola	SKPD dan Masyarakat		50.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan				
	2.16.0 2.2.01. 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	371.311.400,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		300.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 2.2.01. 0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	51.570.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		100.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 2.2.01. 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi n Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	403.927.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		0	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.0 3.2.02. 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	284.373.800,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		150.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 3.2.02. 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	660.017.500,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		85.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 3.2.02. 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	376.048.900,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		500.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.16.0 3.2.02. 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	149.999.800,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		90.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						74.092.200,00							100.000.000,00	
1.	2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase SKPD yang menyampaikan metadata	-			85 persen	74.092.200,00						-	100.000.000,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sektoral sesuai standar Persentase SKPD yang menyampaikan rekomendasi kegiatan statistik sektoraal yang valid dan update				85 persen									
	2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid dan update	-			85 persen	74.092.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat	-	100.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.20.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	74.092.200,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		100.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						83.701.600,00							140.000.000,00	
1.	2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Aplikasi sesuai KAMI Indeks Infrastruktur sesuai KAMI	-			1,3 indeks 1,2 indeks	83.701.600,00						-	140.000.000,00	
	2.21.0 2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan dengan perangkat sandi Persentase SKPD yang bersertifikat elektronik	-			90 persen	83.701.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	SKPD	-	140.000.000,00	Dinas Kominfo

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
											PRIORITAS					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												5.Pengembang an tata kelola pemerintahan				
	2.21.0 2.2.01. 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	23.630.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD		50.000.000,00	Dinas Kominfo
	2.21.0 2.2.01. 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	60.071.600,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.Pengembang an tata kelola pemerintahan	SKPD		90.000.000,00	Dinas Kominfo
	J U M L A H							10.684.132.866,00							10.094.500.000,00	

4.1.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kinerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah seluruh Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Mitra Media baik media cetak maupun media elektronik (digital) dan masyarakat.

4.2. Pendanaan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan dana. Pada tahun anggaran 2024 pendanaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebesar **Rp.10.684.132.866,-** (Sepuluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh enam rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel TC 33 lampiran rencana kerja 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Bukittinggi .

Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2022 dan 2023 serta rencana program dan kegiatan tahun 2024, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi program dan kegiatan baik masing-masing program kegiatan maupun secara komprehensif. Dan perlu strategi dalam peningkatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dicapai.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2024 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Terima kasih.

 **WALIKOTA BUKITTINGGI**
BERMAN SAFAR, SH